

UPAH MINIMUM DAN TINGKAT KEMISKINAN: STUDI KEBIJAKAN DI INDONESIA

MINIMUM WAGE AND POVERTY LEVEL: STUDY OF POLICY IN INDONESIA

A. Hasyim Asyari Amir Husni¹, A.M Rusli², Suhardiman Syamsu³, Muhammad Chaeroel Ansar⁴

¹ Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
email: namehasyimasyari@gmail.com

² Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
email: andimrusli@unhas.ac.id

³ Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
email: suhardiman@unhas.ac.id

⁴ Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
email: mchaeroel@unhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Upah minimum adalah topik kebijakan kontroversial yang memengaruhi jutaan pekerja di seluruh dunia, dan memahami dampaknya terhadap tingkat kemiskinan sangat penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti. Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap literatur yang ada, data statistik, dan menggunakan model regresi yang lebih kompleks. Data diolah di dalam Microsoft Excell, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik R. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum efektif mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negative di Indonesia.

Kata Kunci : Upah Minimum; Kemiskinan; Kebijakan

Abstract

This study aims to investigate the relationship between minimum wages and poverty rates. Minimum wage is a controversial policy topic that affects millions of workers around the world, and understanding its impact on poverty rates is crucial for policymakers and researchers. By conducting a comprehensive analysis of existing literature, statistical data, and using more complex regression models. The data was processed in Microsoft Excell, and then analysed using R statistical software. The findings of this study show that minimum wage policy is effective in negatively affecting the poverty rate in Indonesia.

Keywords : Minimum Wage; Poverty; Policy

PENDAHULUAN

Upah minimum adalah alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan dasar upah yang sah bagi pekerja, memastikan bahwa mereka menerima tingkat pendapatan minimum (Jadoon et al., 2021). Ini sering diterapkan dengan tujuan melindungi pekerja dari praktik eksploitatif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Secara bersamaan, kemiskinan adalah masalah mendesak yang memengaruhi individu, keluarga, dan komunitas di seluruh dunia, menghambat pembangunan sosial-ekonomi dan memperburuk ketidaksetaraan (Kis-Katos & Sparrow, 2015). Memahami hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan sangat penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti yang mencari strategi efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Buruh dan upah merupakan dua hal yang saling terhubung, sebab dengan buruh sebagai individu yang bekerja berhak mendapat hasil dari kerjanya yang biasa disebut sebagai upah. Hal ini kemudian dipertegas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 23 ayat 3: “Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya”. Jaminan upah yang dibayarkan ini, bukanlah sebatas penjamin bagi keadilan buruh saja, melainkan

keadilan bagi kesejahteraan buruh dan keluarganya juga (Fellini, 2019; Jadoon et al., 2021). Apakah dengan pembayaran upah ini, buruh/pekerja mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupannya, terutama kebutuhan dasar; sandang, pangan dan papan.

Di dalam upah yang diterima buruh ada banyak jenis upah, salah satunya yang diangkat dalam penelitian kali ini adalah upah minimum. Penentuan upah minimum di daerah (Provinsi) adalah hal paling nyata bagi buruh, bukan hanya menjadi kebutuhan mendasar dari hubungan buruh dengan majikan, upah juga merupakan persoalan yang paling erat kaitannya dengan buruh di daerah, khususnya pascakebijakan otonomi daerah (Bird & Manning, 2008).

Hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan merupakan topik yang cukup menarik dan diperdebatkan di antara para ekonom, pembuat kebijakan, dan kelompok advokasi (Harjanto et al., 2022). Di satu sisi, para pendukung berpendapat bahwa menaikkan upah minimum dapat secara langsung mengangkat pekerja keluar dari kemiskinan dengan memberi mereka penghasilan yang lebih tinggi (Backhaus & Müller, 2023; Fellini, 2019). Mereka berpendapat bahwa menaikkan upah bagi pekerja berpenghasilan rendah dapat meningkatkan standar hidup mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada jaring pengaman sosial. Di sisi lain, orang-orang yang skeptis mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi negatif dari kebijakan upah

minimum, seperti berkurangnya kesempatan kerja, meningkatnya biaya bisnis, dan potensi dampak inflasi (Harjanto et al., 2022; Hauf, 2017).

Mengingat keragaman sudut pandang dan tidak adanya konsensus, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan (Zhou et al., 2019). Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap literatur dan bukti empiris tentang topik ini. Dengan menggunakan metodologi penelitian dan analisis statistik yang tepat, penelitian yang diusulkan ini berupaya untuk memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh kebijakan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan (Wilson, 2017).

Dampak kenaikan upah minimum terhadap kemiskinan berbeda-beda untuk setiap Negara. Ini karena penegakan peraturan dan karakteristik tenaga kerja yang berbeda di masing-masing Negara. Karena tenaga kerja di Negara maju didominasi oleh tenaga kerja terdidik (*skilled workers*), yang lebih rentan terhadap shocks dan memiliki bargaining power yang lebih rendah, penduduk miskin di Negara-negara berkembang akan merasakan manfaat yang berbeda dari kenaikan upah minimum. Sangat menarik untuk menyelidiki

apakah kenaikan upah minimum benar-benar dapat mengurangi kemiskinan karena ada perbedaan dampak kenaikan upah minimum terhadap kemiskinan. Dengan menggunakan data panel pada level provinsi dari tahun 2014 hingga 2022, studi ini akan mengestimasi dampak upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia.

Temuan penelitian ini akan sangat berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam membentuk kebijakan pasar tenaga kerja dan strategi pengurangan kemiskinan. Mengidentifikasi kekuatan, keterbatasan, dan potensi pertukaran yang terkait dengan intervensi upah minimum, penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan keputusan kebijakan berbasis bukti yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah (Scalioni Brito & Lessa Kerstenetzky, 2019). Pada akhirnya, memahami hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Nattrass, 2000).

KAJIAN LITERATUR

Tinjauan literatur bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penelitian yang ada dan wacana ilmiah tentang hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Bagian ini akan memeriksa

teori kunci, konsep, dan studi empiris yang telah menyelidiki hubungan ini. Dengan menganalisis literatur, tinjauan tersebut berupaya mengidentifikasi area konsensus, temuan yang bertentangan, dan kesenjangan dalam pengetahuan.

Banyaknya perspektif menjelaskan gagasan tentang pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan, sehingga menjelaskan potensi perbedaan dalam interpretasinya. Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan ini, beberapa pandangan dan prinsip fundamental secara intrinsik terkait dengan upah minimum dan kemiskinan diakui secara luas.

Upah Minimum dan Kemiskinan

Upah minimum sering kali dilihat sebagai alat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dengan memastikan bahwa pekerja menerima pendapatan yang layak (Fields & Kanbur, 2007). Para pendukungnya berpendapat bahwa menaikkan upah minimum dapat secara langsung mengangkat pekerja keluar dari kemiskinan, karena upah yang lebih tinggi akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka berpendapat bahwa menaikkan upah bagi pekerja berpenghasilan rendah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan keadilan sosial (Malloy, 2020).

Studi empiris yang mengkaji pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan

memberikan hasil yang kontradiktif. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara upah minimum dan penurunan angka kemiskinan, penelitian lain menemukan temuan yang beragam atau tidak meyakinkan (Campos-Vazquez & Esquivel, 2023; del Carpio et al., 2019; Lenhart, 2017; Quinn & Cahill, 2017). Hasil yang berbeda dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk variasi dalam metodologi, sumber data, periode waktu, dan faktor kontekstual antar penelitian. Tinjauan terhadap bukti empiris mengenai dampak upah minimum menemukan hasil yang beragam mengenai dampaknya terhadap kemiskinan (Neumark & Wascher, 2007). Beberapa penelitian menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan, sementara penelitian lainnya tidak menunjukkan dampak signifikan atau bahkan potensi dampak buruk terhadap dinamika lapangan kerja dan kemiskinan.

Sementara itu, Allegretto dkk., (2017) mengenai kenaikan upah minimum Seattle dan menemukan sedikit penurunan tingkat kemiskinan di kalangan pekerja yang terkena dampak (Allegretto et al., 2017). Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini mewakili kasus tertentu dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke konteks lain. Di sisi lain, Card & Krueger, (1994) meneliti dampaknya terhadap industri makanan cepat saji di New Jersey dan Pennsylvania dan tidak menemukan dampak

negatif yang signifikan terhadap lapangan kerja terkait dengan kenaikan upah minimum (Card & Krueger, 1994). Namun penelitian ini dikritik dan memicu perdebatan berkelanjutan di kalangan peneliti.

Dampak upah minimum selama Resesi Hebat dan menemukan bukti adanya dampak negatif yang besar terhadap lapangan kerja, terutama bagi kelompok rentan. Namun penelitian ini tidak secara langsung berfokus pada hasil kemiskinan (Clemens, J., & Wither, 2019). Dube dkk. (2018): Studi mereka meneliti dampak upah minimum lintas batas negara dan menemukan dampak negatif yang minimal terhadap lapangan kerja (Dube et al., 2010). Meskipun studi ini tidak secara khusus berfokus pada tingkat kemiskinan, studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai hasil ketenagakerjaan yang terkait dengan perubahan upah minimum. Meer & West, (2016): Studi mereka menemukan bukti beragam mengenai dampak upah minimum terhadap dinamika ketenagakerjaan, dengan beberapa bukti menunjukkan dampak negatif terhadap ketenagakerjaan (Meer & West, 2016). Namun penelitian ini tidak secara langsung fokus pada dampak kemiskinan.

Sebagian ekonom melihat kebijakan upah minimum sebagai masalah distribusi pendapatan, di mana ada orang yang menguntungkan dan orang yang dirugikan dari

kenaikan upah minimum. Mengkaji bagaimana dampak upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia menarik karena pasar kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja tidak terlatih, atau tenaga kerja tidak terlatih; sektor informal, atau sektor yang tidak tertutup, lebih dominan daripada sektor formal, dan sektor formal mendapat keuntungan dari peraturan tenaga kerja yang ada. Di tahun 2015, sebanyak 52% orang Indonesia yang bekerja bekerja di sektor resmi (Pusdatinaker, 2015).

Temuan yang bertentangan mungkin berasal dari variasi sumber data, desain penelitian, ukuran sampel, dan mekanisme spesifik yang mempengaruhi tingkat kemiskinan upah minimum. Selain itu, faktor kontekstual, seperti keadaan perekonomian, kondisi pasar tenaga kerja, dan adanya kebijakan yang saling melengkapi, dapat secara signifikan mempengaruhi hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan (Buszkiewicz et al., 2019). Untuk merekonsiliasi temuan-temuan yang kontradiktif ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan konteks spesifik, menggunakan metodologi yang kuat, dan mempertimbangkan potensi faktor perancu. Studi jangka panjang dan perbandingan lintas negara juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan (Reininger & Castro-Serrano, 2021).

Secara keseluruhan, tinjauan literatur mengungkapkan adanya hubungan yang kompleks dan beragam antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Meskipun beberapa penelitian mendukung gagasan bahwa peningkatan upah minimum dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, masih terdapat perdebatan mengenai potensi trade-off dan dampak yang beragam di berbagai konteks. Bagian selanjutnya dari penelitian ini akan menggunakan metodologi yang sesuai dan analisis empiris untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan-hubungan ini dan memberikan wawasan tambahan.

Keberhasilan pemanfaatan upah minimum sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan mempunyai beberapa tantangan. Pada awalnya, sulit untuk mengantisipasi secara akurat dampak langsung dari upah minimum terhadap gaji dan pekerjaan pekerja di industri yang terkena dampak undang-undang tersebut.

Kebijakan Upah Minimum Indonesia

Sebelum tahun 1999, upah minimum merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, yang memutuskan upah minimum tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Basisnya adalah Provinsi (Daerah Tingkat Pertama), dan disebut dengan “UMR” (upah minimum regional). Setelah diberlakukannya UU No.22/1999, yang

kemudian diperbaiki lagi oleh UU No.32/2004, perbaikan terjadi lagi dengan UU No.12/2008, dan UU.23/2014, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, soal desentralisasi dan otonomi daerah, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka soal upah minimum menjadi kewenangan daerah sepenuhnya.

Selain itu, kebutuhan hidup yang layak menjadi dasar kebijakan upah minimum Indonesia. Di Indonesia, strategi jaring pengaman sosial termasuk upah minimum. Sejak Januari 2001, Gubernur memiliki wewenang untuk menetapkan upah minimum di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan masih bertanggung jawab untuk menetapkan upah minimum. Ini termasuk mengembangkan standar komponen Kebutuhan Hidup Layak, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah minimum.

Upah minimum di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan standar hidup pekerja yang masih menerima upah di bawah standar nasional, tetapi juga untuk melindungi pekerja yang tidak memiliki kekuatan bargaining karena adanya tenaga kerja tidak terampil yang berlebihan. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi menentukan kenaikan upah minimum di masa mendatang (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015).

Setelah era otonomi daerah, penentuan upah minimum menjadi tanggung jawab

sepenuhnya Pemerintah Daerah, yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan merekomendasikan dan kemudian Gubernur yang akan memutuskan. Hal yang mendasar menjadi jaminan hukum atas upah layak sesungguhnya telah ada, UUD 1945 pasal 28D dan pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana dalam pasal 88 menyebutkan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Meliputi antara lain upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, dan upah untuk pembayaran pesangon.

Upah buruh juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), dimana dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia disebutkan bahwa upah buruh harus dapat digunakan untuk mencukupi kehidupan buruh dan keluarganya secara layak dan menjadi tanggung jawab Negara untuk mejaminnya.

Upah minimum di Indonesia dibuat untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang bekerja dengan gaji rendah.

Dampak upah minimum terhadap kemiskinan masih menjadi perselisihan. Pendukungnya berpendapat bahwa aturan upah minimum mengenai upah minimum dapat memperbaiki kondisi ekonomi pekerja dengan gaji rendah, sehingga mengurangi kemiskinan pekerja. Upah minimum, di sisi lain, dapat menyebabkan kekakuan upah di pasar tenaga kerja dan mengurangi daya saing. Kekakuan upah yang disebabkan oleh upah minimum juga dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan (Varlitya et al., 2023). Kenaikan upah minimum dan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan akan sulit terwujud, sebab besaran upah berada pada angka minimum taraf hidup pekerja. Hal ini, mengisyaratkan pengusaha memberikan nilai upah semimumum mungkin dan memberikan kewenangan dalam menentukan besaran upah kepada setiap pekerja. Kemudian, besaran upah minimum hanya menghitung satuan pekerja, tanpa mempertimbangkan anggota keluarga lain dalam tanggungan rumah tangganya. Maka itu, kenaikan upah, akan menjadi formula dalam penurunan angka kemiskinan, jika nilai besaran upah memperhitungkan indicator hidup yang lebih dari taraf minimum. Sehingga, kemakmuran dan kesejahteraan hidup pekerja terwujud.

Upah Minimum dan Kesejahteraan Pekerja

Dalam model buku kompetitif standar, kenaikan upah minimum efektif ceteris paribus akan mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia untuk karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Efek pengangguran ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan upah minimum terhadap distribusi pendapatan bagi pekerja berpendapatan rendah masih belum diketahui. Sebuah bukti bahwa manfaat kenaikan upah minimum tidak didistribusikan secara merata kepada pekerja dengan upah rendah adalah fakta bahwa beberapa pekerja menerima keuntungan, sedangkan yang lain mengalami kerugian. Selain itu, tidak jelas apakah pekerja berupah rendah akan memperoleh pendapatan yang diharapkan karena dampaknya terhadap pendapatan rata-rata bergantung pada skala efek perpindahan dan seberapa fleksibel pasokan tenaga kerja di sektor yang tidak terjangkau (Gramlich et al., 1976). Jika tidak ada dampak pengangguran, dampak akan lebih jelas karena semua pekerja berpenghasilan rendah akan mendapatkan keuntungan.

Ambiguitas teoretis yang serupa mengenai konsekuensi upah minimum terhadap distribusi pendapatan keluarga muncul karena fakta bahwa baik pihak yang dirugikan maupun pihak yang diuntungkan dari kenaikan upah minimum bersatu. Selain itu, jika kita berbicara tentang dampak

keluarga, ada banyak masalah lain yang tidak muncul jika kita hanya berbicara tentang pendapatan. Pertama, perubahan upah minimum dapat berdampak pada penawaran tenaga kerja bagi anggota keluarga pekerja lainnya yang terkena dampak langsung dari upah minimum. Ini sulit diprediksi karena dampak tersebut melibatkan pendapatan dan efek substitusi silang. Kedua, pekerja tidak selalu terfokus pada distribusi pendapatan keluarga kelas bawah. Akibatnya, dampak kenaikan upah minimum akan sangat bergantung pada posisi pendapatan keluarga awal pekerja yang pendapatannya meningkat sebagai akibat dari perubahan tersebut. Ketiga, hanya ada sedikit pedoman teori yang dapat membantu kita menemukan posisi distribusi pendapatan keluarga pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan saat upah minimum dinaikkan. Apakah kehilangan pekerjaan lebih banyak terjadi pada keluarga dengan tingkat distribusi rendah atau tinggi adalah pertanyaan penting dalam menentukan dampak distribusi. Yang terakhir, baik mereka yang terkena dampak kenaikan upah minimum maupun mereka yang mendapat manfaat dari kenaikan tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengubah gaya hidup mereka sebagai akibat dari penurunan atau peningkatan pendapatan. Komplikasi ini menyebabkan prediksi teoritis yang ambigu mengenai dampak kenaikan upah minimum ketika fokus beralih dari pendapatan ke distribusi pendapatan

keluarga, meskipun tidak ada dampak pengangguran.

Penelitian empiris saat ini bertujuan untuk mensimulasikan dampak mandat aktual atau hipotetis terhadap distribusi pendapatan keluarga. Ini dilakukan karena tidak ada prediksi teoretis yang jelas mengenai dampak kenaikan upah minimum terhadap distribusi pendapatan keluarga. Tingkat kemiskinan (atau kesenjangan), rasio pendapatan terhadap kebutuhan, dan pembagian kuintil atau desil adalah pengukuran hasil yang digunakan dalam kegiatan ini.

Dalam kebanyakan kasus, latihan simulasi memungkinkan dampak pengangguran dan cakupan yang tidak lengkap. Dampak pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan rentang elastisitas yang disarankan, yang didasarkan pada perkiraan studi jangka waktu. Salah satu masalah dengan prosedur ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan rangkaian waktu biasanya menunjukkan bagaimana upah minimum mempengaruhi lapangan kerja bagi semua remaja atau dewasa muda, bukan hanya pekerja yang terkena dampak langsung kenaikan upah minimum. Oleh karena itu, jika diterapkan pada sekelompok pekerja dengan upah minimum yang sama, dampak akan lebih kecil. Selain itu, studi simulasi yang dilakukan oleh Horrigan & Mincy, (1993), Johnson &

Browning, (1983), dan Mincy, (1990) tampaknya berasumsi bahwa dampak pengangguran adalah proporsi jam kerja awal untuk setiap pekerja yang terkena dampak. Dengan demikian, setiap pekerja mengalami dampak pengangguran pada jam kerja awalnya. Asumsi ini memastikan bahwa setiap karyawan dengan upah rendah akan memperoleh keuntungan dari simulasi kenaikan upah minimum karena elastisitas yang digunakan dalam studi ini tidak pernah melebihi satu.

Studi simulasi juga harus membuat asumsi tentang bagaimana upah minimum mempengaruhi pekerja yang awalnya bekerja di bawah upah minimum yang saat ini dibayarkan. Sebagian besar penelitian pertama-tama berasumsi bahwa karyawan ini akan dinaikkan ke tingkat minimum yang baru. Kemudian, dalam kasus cakupan parsial, asumsi ini diulangi dengan asumsi bahwa karyawan tidak akan terpengaruh oleh perubahan tersebut (lihat Burkhauser & Finegan, 1989; Horrigan & Mincy, 1993; Johnson & Browning, 1983; Mincy, 1990) Salah satunya adalah Johnson & Browning, (1983), yang menaikkan upah pekerja yang saat ini berada di bawah upah minimum dengan proporsi yang sama dengan kenaikan upah minimum. Simulasi memperkirakan bahwa upah pekerja akan dinaikkan ke upah minimum yang baru jika mereka memiliki penghasilan antara upah minimum yang baru dan yang lama.

Studi sebelumnya mengenai pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan menemukan bahwa upah minimum mengurangi kemiskinan, yang tampaknya menunjukkan dampak yang cukup kuat. Oleh karena itu, Burkhauser & Finegan, (1989) menemukan bahwa jumlah pekerja berpendapatan rendah yang termasuk dalam kategori kemiskinan akan turun sebesar 21% karena kenaikan upah minimum sebesar 24% pada tahun 1984, mengurangi tingkat kemiskinan mereka dari 14% menjadi 11%. Namun, mereka juga menemukan bahwa peningkatan pendapatan kurang dari 12% berasal dari kenaikan upah minimum. Mincy, (1990) melihat dampak yang tampaknya lebih besar pada pengentasan kemiskinan ketika dia memodelkan efek kenaikan upah minimum sebesar 27% yang diterapkan pada distribusi pendapatan tahun 1987. Ia menemukan secara khusus bahwa jumlah keluarga miskin—di antara semua keluarga, bukan hanya keluarga dengan gaji rendah—harus turun sebesar 6% pada cakupan parsial dan 9% pada cakupan penuh. Namun, besaran ini cukup sensitif terhadap pilihan fleksibel untuk permintaan karyawan dewasa minimum.

Sebuah simulasi yang melihat bagaimana upah minimum mempengaruhi ketimpangan pendapatan keluarga menunjukkan dampak yang tidak terlalu signifikan. Johnson & Browning, (1983),

dalam sebuah penelitian yang terkenal karena upaya mereka untuk mendorong perubahan yang menyertai pembayaran pajak dan transfer, menemukan bahwa koefisien Gini untuk pendapatan keluarga hampir tidak terpengaruh oleh hipotesis kenaikan upah minimum sebesar 22 persen pada tahun 1976. Di sisi lain, persentase pendapatan keluarga per kuintil tidak terpengaruh. Sebaliknya, simulasi Horrigan & Mincy, (1993), yang didasarkan pada upah minimum \$4,71 pada tahun 1987, menunjukkan sedikit penurunan dalam ketimpangan pendapatan.

Konsensus dari studi simulasi sebelumnya adalah bahwa upah minimum mengurangi kemiskinan, terutama dengan meningkatkan pendapatan di seluruh distribusi, meskipun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan berpenghasilan rendah tersebar secara merata di seluruh distribusi pendapatan keluarga. Tetapi asumsi penyederhanaan yang tersirat dalam simulasi ini mungkin sangat penting untuk hasilnya. Ada kemungkinan bahwa asumsi-asumsi tertentu tentang besaran dan kejadian dampak perpindahan menyebabkan temuan ini. Selain itu, asumsi tentang cakupan kenaikan upah minimum bagi pekerja yang pada awalnya berada di bawah upah minimum yang berlaku saat ini menyebabkan masalah. Selain itu, penelitian ini mengabaikan masalah yang mungkin muncul

dari perubahan dalam unit keluarga dan pasokan tenaga kerja bagi anggota keluarga lainnya.

Buku *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage* karya Card & Krueger, (1994), merupakan satu-satunya penelitian empiris langsung tentang hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Mereka memperkirakan regresi, di mana perubahan tingkat kemiskinan negara bagian dari tahun 1989 hingga 1991 mengalami regresi terhadap sebagian kecil angkatan kerja negara bagian (pada tahun 1989). Ini seharusnya dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum federal pada tahun 1990 dan 1991, yaitu, sebagian kecil dari tingkat upah minimum tahun 1989 lebih rendah daripada tingkat upah minimum tahun 1991. Meskipun hasilnya berbeda-beda menurut spesifikasi, hasilnya selalu memberikan perkiraan koefisien negatif, yang menunjukkan bahwa semakin banyak pekerja yang terkena dampaknya, semakin kecil kemungkinan tingkat kemiskinan akan turun. Namun, hasil yang diperoleh mengenai tingkat kemiskinan secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik dan masih sangat kecil. Selain itu, mereka memperkirakan regresi terpisah yang menemukan dampak yang lebih kuat dengan hanya menggunakan tingkat kemiskinan pekerja sebagai variabel terikatnya. Namun, metode ini tidak melihat pengaruh upah

minimum terhadap pengangguran. Card & Krueger, (1995, hal. 307) menyimpulkan bahwa analisis mereka "menunjukkan adanya dampak upah minimum yang tidak terlalu besar dalam mengurangi kemiskinan", terlepas dari kekurangan bukti statistik mereka (Card & Krueger, 1994).

Metode kami tidak memerlukan pembuatan model yang ketat, dan mungkin tidak realistis untuk mengevaluasi dampak upah minimum terhadap kemiskinan, berbeda dengan perlakuan simulasi. Kami malah mengkorelasikan perubahan dalam kemiskinan (dan ukuran distribusi lainnya) dengan perubahan dalam upah minimum. Kami melakukan ini dengan berfokus pada kelompok pekerja tertentu yang dianggap paling mungkin terkena dampak undang-undang upah minimum, berdasarkan literatur mengenai dampak upah minimum terhadap lapangan kerja. Kami berbeda dari analisis regresi Card & Krueger, (1995) dalam dua hal utama. Pertama, kami berfokus pada dampak di antara keluarga dengan penghasilan rendah daripada pada semua keluarga (di mana dampak mungkin terjadi). menjadi sangat kecil); dan kedua, kami mempertimbangkan periode yang jauh lebih lama daripada interval dua tahun sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Model Analisis

Data Kemiskinan dan Upah Minimum tiap Provinsi diambil dari rilis data Badan Pusat Statistik Indonesia. Sedangkan angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Modul KP) periode Maret dan September.

Pengumpulan data ketenagakerjaan nasional yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan sampel yang tersebar di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel. Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden.

Merinci teknik statistik dan model regresi yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Dalam analisis regresi, hubungan antara upah minimum (variabel independen) dan angka kemiskinan (variabel dependen) dapat direpresentasikan dengan menggunakan model regresi dengan data time series.

Dalam model ini, memanfaatkan data panel tahunan tingkat provinsi dikumpulkan dari 34 provinsi. Data kemiskinan dicatat secara tahunan yang mencakup bulan September 2014–2022 sedangkan data upah minimum provinsi dicatat secara tahunan yang mencakup bulan November 2014-2022 dan mempertimbangkan hubungan linier antara variabel kemiskinan dan variabel upah minimum dalam konteks data time series. Model ini memiliki formulasi seperti berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \chi_1 + \varepsilon_1$$

y_{it} adalah nilai variabel kemiskinan (%) untuk provinsi i pada waktu t .

χ_1 adalah nilai variabel upah minimum (Rp) pada waktu 2014-2022.

β_0 adalah intercept (titik potong).

β_1 adalah koefisien regresi yang mengukur hubungan linier antara variabel independen dan dependen.

ε_1 adalah komponen kesalahan pada waktu t .

Analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi nilai β_0 dan β_1 berdasarkan data yang tersedia untuk memahami hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Dengan memperkirakan koefisien-koefisien ini, kita dapat menentukan dampak yang diharapkan dari perubahan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini dengan meninjau beberapa literature terkait, seperti yang diutarakan oleh (Card & Krueger, 1994;

Gramlich et al., 1976; Varlitya et al., 2023), upah minimum dan kemiskinan memang masih menjadi topic yang belum terselesaikan hari ini. Sebab, kenaikan angka kemiskinan dan pengaruh upah terhadap penurunan kemiskinan dibebberapa penelitian sebelumnya berdampak sangat signifikan. Dengan memberikan gambaran terbaru terkait kondisi upah hari ini, serta dengan analisis regresi yang tidak dilakukan pada penelitian sebelumnya membuat kajian ini lebih dalam dan memperhitungkan formulasi kebijakan upah dalam mengurai kemiskinan khususnya di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa formula ini merupakan model regresi linier sederhana, dengan asumsi hubungan linier antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Dalam praktiknya, model regresi yang lebih kompleks, seperti regresi berganda, dapat digunakan untuk menggabungkan variabel kontrol tambahan dan memperhitungkan faktor pembaur potensial. Data mentah dimasukan ke dalam Microsoft Excell kemudian untuk melakukan analisis regresi dan memperkirakan koefisien menggunakan perangkat lunak statistik R.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif Upah Minimum dan Kemiskinan

Hasil analisis tabel 1 menunjukkan deskripsi upah minimum dan kemiskinan dengan mean sebesar masing-masing, 2.279.642,00 dan 7,381. Mengenai upah minimum sepuluh tahun terakhir, nilai rata-rata mengindikasikan upah yang minimum rendah dengan mempertimbangkan nilai minimum sebesar 1.359.064,00 dan maksimum 3.723.282,00. Sedangkan, kemiskinan dari tahun 2014 sampai 2022 menunjukkan angka yang tinggi dengan nilai minimum 3.10% dan maksimum 16.67 % besaran nilainya.

Tabel 1. Indikator Upah Minimum dan Kemiskinan Tahun 2014-2022

Variable	Mean	SD	Minim um	Maksim um
Minimum	22796	48957	13590	372328
Wage	42	5.6	64	2
	7,381	3,481		16,675
Poverty	606	024	3,1005	5

Sumber: BPS dan diolah oleh penulis

Rata-rata kenaikan upah minimum sebesar 7% tiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan hanya sebesar 4%. Lebih lanjut persentasi kemiskinan cenderung stagnan pada angka rata-rata 7% dan mengalami penurunan di tahun 2019. Namun, kembali meningkat pada tahun selanjutnya sebesar 7.3%.

Gambar 1. Upah Minimum Indonesia



Sumber: BPS dan diolah oleh penulis

Kenaikan upah minimum provinsi di 34 daerah dari tahun ketahun, jika dilihat dari pembagian dua wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Sejak tahun 2014 sampai 2023, tidak terjadi kenaikan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Kenaikan tertinggi berada pada wilayah timur, jika dibandingkan dari wilayah barat. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari besaran jumlah wilayah masing-masing, timur Indonesia sebanyak 17 Provinsi dan barat Indonesia terdiri dari 16 Provinsi.

Upah minimum di Indonesia dapat berbeda-beda berdasarkan wilayah, dengan wilayah barat dan timur Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dalam tingkat biaya hidup. Pemerintah Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk setiap provinsi. Oleh karena itu, angka upah minimum dapat berubah dari tahun ke tahun dan antarprovinsi. Wilayah barat Indonesia, seperti Provinsi DKI Jakarta, seringkali memiliki UMP yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, UMP di DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp 4.901.798. Ini mencerminkan tingkat biaya

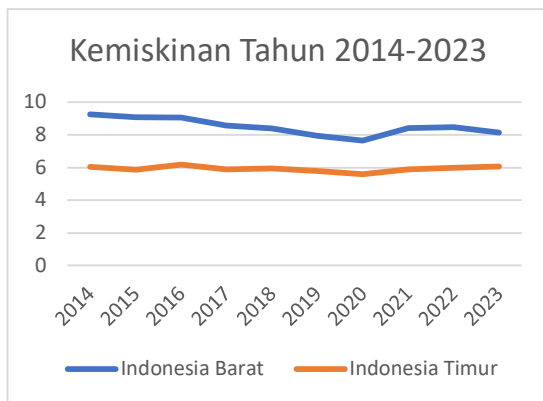
hidup yang lebih tinggi di wilayah metropolitan. Sebaliknya, di wilayah timur Indonesia, seperti Provinsi Papua, UMP juga tinggi, mencapai lebih dari Rp 3.864.696 pada tahun yang sama. Biaya hidup yang tinggi di Papua dan jarak yang jauh dari perdagangan pusat nasional berkontribusi pada UMR yang lebih tinggi di wilayah ini.

Namun, ada juga wilayah-wilayah di timur Indonesia, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana UMR cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah barat. Pada tahun 2023, UMP di NTT sekitar Rp 2.000.000 setiap bulannya, menggambarkan perbedaan signifikan dalam biaya hidup antara wilayah barat dan timur.

Pemerintah Indonesia secara berkala meninjau dan menyesuaikan UMP sesuai dengan perubahan biaya hidup dan tingkat inflasi di setiap wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja di seluruh negeri menerima upah yang sesuai dengan kondisi ekonomi setempat. Perbedaan ini mencerminkan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan Indonesia, pada gambar 2, terlihat adanya perbedaan persentasi angka kemiskinan di wilayah timur dan barat Indonesia.

Gambar 2. Persentasi Kemiskinan di Perkotaan Indonesia



Sumber: BPS dan diolah oleh penulis

Perbedaan kemiskinan di perkotaan antara wilayah barat dan timur Indonesia merupakan fenomena yang menggambarkan ketidaksetaraan dalam hal perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai bagian negara. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan ini sangat kompleks dan bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Wilayah barat Indonesia, yang mencakup pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, dan Bali, memiliki akses yang lebih baik ke pusat ekonomi dan infrastruktur nasional. Hal ini menciptakan peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pulau-pulau ini juga sering kali diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatera, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, wilayah timur Indonesia, yang melibatkan pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku, dan Papua, seringkali menghadapi tantangan yang berbeda. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal aksesibilitas, dengan banyaknya daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Infrastruktur yang kurang berkembang, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, menghambat pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Perbedaan dalam struktur demografi juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Wilayah barat, dengan populasi yang lebih besar dan lebih heterogen secara etnis dan budaya, memiliki lebih banyak peluang ekonomi dan akses ke pasar yang besar. Sementara itu, wilayah timur seringkali memiliki populasi yang lebih homogen secara etnis dan budaya, yang mungkin menghambat pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah ke dalam perekonomian nasional. Selain itu, beberapa wilayah di timur Indonesia, terutama Papua, telah mengalami konflik politik dan keamanan yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Konflik ini menimbulkan gangguan dan gangguan yang mengganggu kondisi ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi perbedaan kemiskinan ini, pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi langkah-langkah yang krusial.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam wilayah timur juga harus ditekankan untuk memastikan bahwa sumber daya alam wilayah timur dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan bahwa perbedaan kemiskinan antara wilayah barat dan timur Indonesia dapat dikurangi seiring berjalannya waktu, yang akan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh negara.

Analisis Inferensial Pengaruh Upah Minimum dan Kemiskinan

Melalui proses analisis regresi yang dijalankan, berhasil menganalisis hubungan yang melibatkan faktor upah minimum dan dampaknya terhadap variabel tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan terukur antara variabel upah minimum dan tingkat kemiskinan. Hasil ini diperkuat oleh koefisien regresi (b) untuk upah minimum yang tercatat sebesar -0.001, yang disertai dengan nilai p-value yang menunjukkan signifikansi statistik pada tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya yaitu 0.001.

Tabel 2. Indikator Upah Minimum & Kemiskinan

Variables	Poverty_Status	
	Coefficient	P-Value
UMP	-0.001 ***	0.003
Constant	8.767 ***	0.001
F-statistic (d.f.)	16.57 (1,8)	
p-value	0.003	
R ²	0.633	

***, **, and * indicate $p < 0.01$, 0.05 , and 0.10 , respectively.

Sumber: BPS dan diolah oleh penulis

Besaran pengaruh upah minimum dan kemiskinan di Indonesia sebesar 0.001 secara negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan dalam upah minimum menurunkan kemiskinan sebesar 0.001 (*p-value* 0.03), berdasarkan *p-value* mengindikasikan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Lebih lanjut, berdasarkan R-Square terdapat 27% variable lainnya yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dengan kata lain, ketika upah minimum dinaikkan sebesar 1 rupiah, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,001%.

PEMBAHASAN

Jika melihat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, sebaran kemiskinan di Indonesia untuk wilayah Timur dan barat Indonesia ada perbedaan signifikan untuk kedua wilayah tersebut, dihitung dari persentasi rata-rata di 17 provinsi wilayah timur

Indonesia, yakni sebesar 2.637.000 angka kemiskinan. Sedangkan wilayah barat Indonesia dengan persentasi kemiskinan sebesar 6.769.000 penduduk. Wilayah barat Indonesia, seperti Jawa, Bali, dan Sumatera, cenderung memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, aksesibilitas yang lebih mudah, dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi di wilayah barat dapat memberikan lebih banyak peluang ekonomi bagi penduduknya. Di sisi lain, wilayah timur Indonesia sering menghadapi tantangan geografis dan demografis yang berdampak pada tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Dalam PDRB per kapita daerah-daerah tersebut, yang berkisar antara, 1.363.206,00 sampai 3.723.282,00 yang menunjukkan kesenjangan ekonomi antar daerah. Data Upah Minimum Provinsi untuk beberapa daerah di Indonesia. Jumlah upah minimum provinsi, secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun untuk setiap wilayah, menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang potensial. Untuk upah minimum terendah ada pada provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Secara historis, upah minimum provinsi di Indonesia cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan upah minimum provinsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas, serta kebijakan pemerintah dan perundingan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Untuk Upah minimum wilayah barat Indonesia, seperti Provinsi DKI Jakarta dan Banten, cenderung memiliki upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat perkembangan ekonomi, tingkat urbanisasi, serta tingkat kehidupan yang lebih mahal di wilayah tersebut. Namun, tidak semua provinsi yang berada di wilayah barat berada pada tingkat upah minimum yang tinggi, seperti Jawa Tengah 1.359.064, Yogyakarta 1.363.206, yang memiliki besaran upah dari 10 tahun terakhir ini lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi yang berada pada wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi Selatan dengan total besaran upah 2.681.447, Papua 3.003.257, Bali 2.157.187, sedangkan Nusa Tenggara Barat 1.843.819 Nusa Tenggara Timur sedikit lebih rendah 1.680.399.

Implikasi dari temuan ini relevan dalam konteks pengembangan kebijakan (Feriyanto et al., 2020). Dalam situasi di mana upah minimum ditingkatkan, dapat diantisipasi bahwa potensi pengurangan kemiskinan akan menjadi lebih nyata (Gindling & Terrell, 2010). Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa

temuan ini mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor tambahan seperti kondisi ekonomi makro dan mikro, kebijakan sosial, serta variabel regional yang tidak dimasukkan dalam model analisis (Levanon et al., 2021; Zhou et al., 2019).

Temuan ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya, seperti del Carpio et al., (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan upah minimum terhadap pengurangan kemiskinan di Thailand (del Carpio et al., 2019). Upah minimum yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan niat kerja dan pendapatan petani di negara-negara industri, seperti yang ditunjukkan oleh temuan Liu et al., (2023) di Tiongkok, dan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap petani berpenghasilan rendah (Liu et al., 2023).

Hal ini tentu saja menjadi perdebatan, baik dalam model analisis yang digunakan, maupun perbedaan variabelnya. Pertama, fokus analisis hanya mencakup hubungan antara dua variabel yaitu upah minimum dan tingkat kemiskinan, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti variabel kontrol pendidikan yang dalam penelitiannya Begitu pula di negara maju, seperti temuan Stevans & Sessions, (2001) di AS dengan hasil yang sangat signifikan. Temuan empiris ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diarahkan untuk menaikkan upah minimum, meningkatkan partisipasi angkatan kerja,

memberikan subsidi pendidikan tinggi, dan meningkatkan cakupan upah minimum adalah cara yang paling efisien untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan (Stevans & Sessions, 2001).

Penelitian yang lain mengatakan peningkatan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan pengangguran (Sotomayor, 2021). Dapat dilihat bagaimana pengusaha, terutama di sektor-sektor dengan profitabilitas yang rendah, mungkin merasa terbebani oleh biaya tambahan yang terkait dengan upah minimum yang lebih tinggi, dan akibatnya, mereka mungkin merumahkan pekerja atau berhenti merekrut pekerja baru (Marinda et al., 2017).

Peningkatan pengangguran sebagai dampak dari peningkatan upah minimum yang lebih tinggi adalah salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan upah minimum. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus memahami bahwa sementara upah minimum yang lebih tinggi mungkin meningkatkan pendapatan bagi beberapa pekerja, hal ini juga dapat memiliki dampak negatif pada tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor dengan margin keuntungan yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis menyeluruh untuk memahami dampak-dampak ini dan menentukan kebijakan yang seimbang untuk mengatasi masalah kemiskinan tanpa mengorbankan lapangan kerja.

Kemudian besaran nilai upah minimum di beberapa wilayah Indonesia, memiliki nilai berbeda. Hal ini mengacu pada regulasi yang berlaku di masing-masing wilayah. Perbedaan nilai upah ini memiliki pengaruh terhadap perpindahan pekerja ke satu wilayah tertentu yang memiliki besaran nilai yang tinggi (Feriyanto et al., 2020). Migrasi pekerja adalah respons terhadap peningkatan upah minimum yang signifikan. Pekerja yang kehilangan pekerjaan di Kota asal mungkin merasa terdorong untuk mencari peluang pekerjaan di wilayah tetangga, di mana upah minimum tetap rendah. Dalam pencarian pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, pekerja bermigrasi ke Kota lain, yang menyebabkan perubahan dalam dinamika pasar tenaga kerja di kedua wilayah tersebut.

Namun, kejadian migrasi pekerja yang disebabkan oleh peningkatan upah minimum memiliki implikasi terhadap tingkat kemiskinan. Di satu sisi, pekerja yang berhasil menemukan pekerjaan dengan upah lebih tinggi di wilayah lain mungkin dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan mereka (Susanto & Sulaiman, 2022). Namun, pada sisi lain, migrasi pekerja dapat meningkatkan persaingan di wilayah tujuan dan dapat membuat pekerja lokal lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan (Gries et al., 2016).

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar langkah selanjutnya melibatkan analisis yang lebih rinci, melibatkan variabel tambahan dan data empiris dari berbagai negara. Pendekatan ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan.

Melalui analisis regresi ini, kami berhasil mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan di berbagai negara. Namun, untuk memahami dinamika tersebut secara lebih komprehensif, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan melibatkan faktor-faktor yang lebih kompleks. Temuan ini memberikan dasar untuk mempertimbangkan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan melalui strategi pengaturan upah minimum. Permasalahan kebijakan upah minimum seringkali kompleks dan memerlukan pendekatan yang beragam. Salah satu temuan yang terlihat dalam penelitian ini yang dapat dipertimbangkan adalah diferensiasi upah minimum berdasarkan wilayah atau sektor ekonomi. Dengan mengakui perbedaan biaya hidup di setiap wilayah atau sektor, kebijakan upah dapat disesuaikan untuk mencerminkan realitas ekonomi setempat. Selain itu, pengindeksan upah minimum dengan tingkat inflasi atau produktivitas juga dapat dijadikan solusi untuk menjaga daya beli pekerja seiring waktu. Pemantauan dan evaluasi berkala

kebijakan upah minimum menjadi langkah penting, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dampak dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain itu, melibatkan pihak-pihak terkait seperti serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi, dapat membantu mencapai kebijakan yang lebih seimbang.

KESIMPULAN

Dalam analisis regresi, kami menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan di berbagai negara. Koefisien negatif sebesar -0,01 menunjukkan bahwa, ketika upah minimum dinaikkan sebesar 1 rupiah, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,001%. Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa menaikkan upah minimum dapat menjadi instrumen kebijakan yang relevan untuk mengurangi kemiskinan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang signifikan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. UMP adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap provinsi di Indonesia, yang mencerminkan perbedaan biaya hidup, inflasi, dan pertimbangan sosial-ekonomi yang beragam di seluruh negeri.

Penelitian empiris menunjukkan adanya perbedaan yang substansial antara UMP di

wilayah barat dan timur Indonesia. Di wilayah barat, seperti DKI Jakarta, UMP secara konsisten mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur. Pada tahun 2021, UMP di DKI Jakarta melampaui angka Rp 4.000.000, sementara di wilayah timur seperti Papua, UMP juga tinggi dengan angka lebih dari Rp 3.000.000 setiap bulannya.

Perbedaan ini tercermin dari perbedaan dalam biaya hidup yang signifikan antara wilayah barat dan timur. DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan perkotaan, memiliki tingkat biaya hidup yang tinggi, sementara Papua menghadapi tingkat biaya hidup yang juga tinggi, sebagian disebabkan oleh isolasi geografis dan infrastruktur yang terbatas. Di sisi lain, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) di timur Indonesia memiliki UMP yang lebih rendah, yakni sekitar Rp 2.000.000 setiap bulannya pada tahun 2021, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan biaya hidup yang lebih rendah.

Penentuan UMP ini juga bergantung pada faktor-faktor inflasi dan pertimbangan ekonomi lokal. Wilayah-wilayah dengan inflasi yang lebih tinggi cenderung memiliki peningkatan UMP yang lebih signifikan.

Perbedaan UMP antarwilayah mencerminkan kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia. Perbedaan ini mengakibatkan tantangan yang beragam dalam

upaya mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Sebuah pendekatan kebijakan yang beragam dan terfokus pada setiap wilayah dapat menjadi solusi yang efektif. Pemerintah perlu terus melakukan peninjauan dan penyesuaian UMP untuk mencapai tujuan kesetaraan ekonomi yang lebih besar di seluruh negeri dan mengatasi perbedaan ekonomi yang signifikan antara wilayah barat dan timur.

Namun, penting untuk menyadari keterbatasan penelitian ini, termasuk fokusnya pada hubungan dua variabel yang disederhanakan dan sifat sintetik dari data yang digunakan dalam simulasi. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan analisis yang lebih komprehensif dengan variabel tambahan dan data empiris dari berbagai negara disarankan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kompleks antara kebijakan upah minimum dan kemiskinan.

Analisis ini memberikan wawasan berharga mengenai potensi dampak penyesuaian upah minimum terhadap pengentasan kemiskinan. Namun pengambilan kebijakan harus didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks ekonomi dan sosial yang lebih luas, serta mempertimbangkan potensi dampak yang tidak diinginkan.

REFERENSI

- Allegretto, A., Reich, M., Allegretto, S., & Godoey, A. (2017). *Chairs Sylvia Seattle's Minimum Wage Experience 2015-16. June*.
- Backhaus, T., & Müller, K.-U. (2023). Can a federal minimum wage alleviate poverty and income inequality? Ex-post and simulation evidence from Germany. *Journal of European Social Policy, 33*(2), 216–232.
<https://doi.org/10.1177/09589287221144233>
- Bird, K., & Manning, C. (2008). Minimum Wages and Poverty in a Developing Country: Simulations from Indonesia's Household Survey. *World Development, 36*(5), 916–933.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.012>
- Burkhauser, R. V., & Finegan, T. A. (1989). The minimum wage and the poor: The end of a relationship. *Journal of Policy Analysis and Management, 8*(1), 53–71.
- Buszkiewicz, J., House, C., Aggarwal, A., Long, M., Drewnowski, A., & Otten, J. J. (2019). The impact of a city-level minimum wage policy on supermarket food prices by food quality metrics: A two-year follow up study. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 16*(1).
<https://doi.org/10.3390/ijerph16010102>
- Campos-Vazquez, R. M., & Esquivel, G. (2023). The Effect of the Minimum Wage on Poverty: Evidence from a Quasi-Experiment in Mexico. *Journal of Development Studies, 59*(3), 360–380.
<https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2130056>
- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Card Krueger, Minimum Wages and Employment. *American Economic Review, 90*(5), 1397–1420.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1995). *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage*. HeinOnline.

- Clemens, J., & Wither, M. (2019). *the Minimum Wage and the Great Recession* :
- del Carpio, X. V, Messina, J., & Sanz-de-Galdeano, A. (2019). Minimum Wage: Does it Improve Welfare in Thailand? *Review of Income and Wealth*, 65(2), 358–382.
<https://doi.org/10.1111/roiw.12360>
- Dube, A., Lester, T. W., & Reich, M. (2010). MINIMUM WAGE EFFECTS ACROSS STATE BORDERS: ESTIMATES USING CONTIGUOUS COUNTIES. *The Review of Economics and Statistics*, 92(4), 945–964.
<http://www.jstor.org/stable/40985804>
- Fellini, I. (2019). Minimum wage: The only priority for the italian labour market? *Politiche Sociali*, 6(3), 537–541.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089076828&partnerID=40&md5=bc399d654ae3ed6b256c6fef39a45e51>
- Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). THE IMPACT of UNEMPLOYMENT, MINIMUM WAGE, and REAL GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT on POVERTY REDUCTION in PROVINCES of INDONESIA. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088–1099.
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- Fields, G. S., & Kanbur, R. (2007). Minimum wages and poverty with income-sharing. *Journal of Economic Inequality*, 5(2), 135–147.
<https://doi.org/10.1007/s10888-006-9037-5>
- Gindling, T. H., & Terrell, K. (2010). Minimum Wages, Globalization, and Poverty in Honduras. *World Development*, 38(6), 908–918.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.02.013>
- Gramlich, E. M., Flanagan, R. J., & Wachter, M. L. (1976). Impact of Minimum Wages on Other Wages, Employment, and Family Incomes. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1976(2), 409.
<https://doi.org/10.2307/2534380>
- Gries, T., Kraft, M., & Simon, M. (2016). Explaining inter-provincial migration in China. *Papers in Regional Science*, 95(4), 709–731.
<https://doi.org/10.1111/pirs.12156>
- Harjanto, N., Chandra, A. M., Nurim, Y., Wijaya, N. R., & Susilowati, I. (2022). Analysis of the Effect of Wages and Reduction of Working Hours on Poverty in Indonesia with Gross Regional Domestic Product as Moderator. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11(4), 143–153.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85149775342&partnerID=40&md5=a0a2079580e3aae13e713317a82c1267>
- Hauf, F. (2017). Paradoxes of Transnational Labour Rights Campaigns: The Case of Play Fair in Indonesia. *Development and Change*, 48(5), 987–1006.
<https://doi.org/10.1111/dech.12321>
- Horrigan, M. W., & Mincy, R. B. (1993). The minimum wage and earnings and income inequality. *Uneven Tides: Rising Inequality in America*, 251–275.
- Jadoon, A. K., Tanveer, A., Javed, M. F., & Sarwar, A. (2021). Minimum wages and poverty: A cross-country analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 11(8), 632–643.
<https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEF.R.2021.118.632.643>
- Johnson, W. R., & Browning, E. K. (1983). The Distributional and Efficiency Effects of Increasing the Minimum Wage: A Simulation. *The American Economic Review*, 73(1), 204–211.
<http://www.jstor.org/stable/1803938>
- Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). Poverty, labor markets and trade liberalization in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 117, 94–106.
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.07>

005

- Lenhart, O. (2017). The impact of minimum wages on population health: evidence from 24 OECD countries. *European Journal of Health Economics*, 18(8), 1031–1039.
<https://doi.org/10.1007/s10198-016-0847-5>
- Levanon, A., Lavee, E., & Strier, R. (2021). Explaining the Factors Shaping the Likelihood of Poverty Among Working Families by Using a Concurrent Mixed Method Design. *Social Indicators Research*, 157(3), 1089–1109.
<https://doi.org/10.1007/s11205-021-02689-5>
- Liu, E., Jiang, Y., Zhang, Q., Yan, L., & Liu, J. (2023). A study of the anti-poverty effect of minimum wage in underdeveloped areas: based on the perspective of farmers' employment choices and income. *Journal of the Asia Pacific Economy*.
<https://doi.org/10.1080/13547860.2023.2186024>
- Malloy, L. C. (2020). The minimum wage, bargaining power, and the top income share. *Forum for Social Economics*, 49(1), 75–98.
<https://doi.org/10.1080/07360932.2016.1155468>
- Marinda, A., Mukhlis, I., Witjaksono, M., Utomo, S. H., Wahyono, H., Soesilo, Y. H., & Santoso, S. (2017). The analysis of the economic growth, minimum wage, and unemployment rate to the poverty level in East Java. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 127–138.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85036580835&partnerID=40&md5=32c2b17a2809162e0b19a15f64c32e82>
- Meer, J., & West, J. (2016). Effects of the minimum wage on employment dynamics. *Journal of Human Resources*, 51(2), 500–522.
<https://doi.org/10.3368/jhr.51.2.0414-6298R1>
- Mincy, R. B. (1990). “*Raising the Minimum Wage: Effects on Family Poverty.*”
- Nattrass, N. (2000). Wage strategies and minimum wages in decentralized regions: The case of the clothing industry in Phuthaditjhaba, South Africa. *International Journal of Urban and Regional Research*, 24(4), 873–888.
<https://doi.org/10.1111/1468-2427.00284>
- Neumark, D., & Wascher, W. L. (2007). Minimum wages and employment. *Foundations and Trends in Microeconomics*, 3(1), 1–182.
<https://doi.org/10.1561/07000000015>
- Quinn, J. F., & Cahill, K. E. (2017). The relative effectiveness of the minimum wage and the earned income tax credit as anti-poverty tools. *Religions*, 8(4).
<https://doi.org/10.3390/rel8040069>
- Reininger, T., & Castro-Serrano, B. (2021). Poverty and human capital in Chile: The processes of subjectivation in conditional cash transfer programs. *Critical Social Policy*, 41(2), 229–248.
<https://doi.org/10.1177/0261018320929644>
- Scalioni Brito, A., & Lessa Kerstenetzky, C. (2019). Has the minimum wage policy been important for reducing poverty in Brazil? A decomposition analysis for the period from 2002 to 2013. *Economía*, 20(1), 27–43.
<https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.02.002>
- Sotomayor, O. J. (2021). Can the minimum wage reduce poverty and inequality in the developing world? Evidence from Brazil. *World Development*, 138.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105182>
- Stevens, L. K., & Sessions, D. N. (2001). Minimum wage policy and poverty in the United States. *International Review of Applied Economics*, 15(1), 65–75.
<https://doi.org/10.1080/02692170120013358>
- Susanto, J., & Sulaiman, N. F. C. (2022). Economic Prospects and International

- Labor Migration. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(8), 2475–2483.
<https://doi.org/10.18280/ijmdp.170815>
- Varlitya, C. R., Masbar, R., Jamal, A., & Nasir, M. (2023). DO REGIONAL MACROECONOMIC VARIABLES INFLUENCE THE INCOME INEQUALITY IN INDONESIA? *Ikonomicheski Izsledvania*, 32(1), 180–199.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147314274&partnerID=40&md5=e7fc53971d0e1afe35c24050883f150b>
- Wilson, S. (2017). The Politics of ‘Minimum Wage’ Welfare States: The Changing Significance of the Minimum Wage in the Liberal Welfare Regime. *Social Policy and Administration*, 51(2), 244–264.
<https://doi.org/10.1111/spol.12286>
- Zhou, R., Peng, P., Zhou, G., Tang, C., & Liu, X. (2019). Analysis of poverty characteristics and poverty influencing factors in different terrain areas. *Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 35(20), 253–261.
<https://doi.org/10.11975/j.issn.1002-6819.2019.20.031>